

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DALAM PELAYANAN SIM DI POLRES PONOROGO**

HaKI



Oleh:

Aditya Yoga Pradana

NIM:

18221751

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM
PELAYANAN SIM DI POLRES PONOROGO**

HaKI

Diajukan guna melengkapi Tugas Akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar
Sarjana dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Robby Darwis Nasution, M.A**
NIK : 19860228 201509 12
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilalukan dan/atau diajukan oleh nama mahasiswa di bawah ini adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Nama : ADITYA YOGA PRADANA
NIM : 18221751
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM PELAYANAN SIM DI POLRES PONOROGO

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

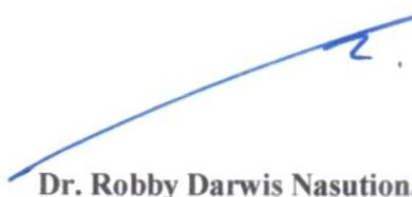
Ponorogo, 19 Februari 2024

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dr. Robby Darwis Nasution, M.A
NIK 19860228 201509 12



Dr. Robby Darwis Nasution, M.A
NIDN. 0728028603

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disusun oleh : ADITYA YOGA PRADANA

NIM : 18221751

Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DALAM PELAYANAN SIM DI POLRES
PONOROGO

Disetujui Pada : 28 Juni 2024

Telah diperiksa dan disetujui

Ponorogo, 25 Juli 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
NIDN. 0728028603

Dosen Pembimbing II



Dr. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN. 0713016201

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DALAM PELAYANAN SIM DI POLRES
PONOROGO

Disusun Oleh : Aditya Yoga Pradana

NIM : 18221751

Telah dipertahankan Di : 5 Agustus 2024

Depan Penguji pada

Hari : Senin

Ruang : A 203

Pukul : 12.30 – 13.30 WIB

DEWAN PENGUJI

PENGUJI


Dr. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN. 0728028603

PENGUJI II


Dr. Insyira Yusdiawan A., M.Sos
NIDN. 0720129401

PENGUJI III


Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
NIDN. 0728028603

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ayub Dwi Anggoro, M.Si., Ph.D
NIK 1986032520130912

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada kedua orangtua saya yang telah mensupport dan mendampingi kami hingga bisa menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana.



ADITYA YOGA PRADANA

MOTTO

“Pemenang adalah orang yang pantang menyerah”

ADITYA YOGAPRADANA



ABSTRAK

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Namun, dalam perjalanannya, terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam mengembangkan upaya Reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi mendahului reformasi di sektor birokrasi dalam melaksanakan gelombang reformasi awal. Misalnya, pemerintah pusat menegaskan kembali pentingnya penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2004. Pemerintah daerah dan semua departemen serta organisasi negara didorong oleh pemerintah nasional pada tahun 2011 untuk berkomitmen pada pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, yang memiliki kekuatan untuk memulai proses secara bertahap pada tahun 2014, dan penciptaan birokrasi yang profesional dan profesional. Pada tahun 2025, integritas akan menjadi kenyataan. Dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan juga semakin merajalela. Permasalahan bersumber dari belum tuntasnya pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan. Meskipun pemerintah telah memberikan dukungan terhadap program pembangunan zona integritas, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Polres Ponorogo dapat mendukung terlaksananya pembangunan zona integritas dengan baik.

Kata Kunci: Zona Integritas, Pembangunan, Pelayanan.

ABSTRACT

Bureaucratic reform basically aims to organize a good, effective and efficient government administration system, so that it can serve the public quickly, precisely and professionally. However, along the way, there were many obstacles faced, including abuse of authority, KKN practices, and weak supervision. In line with this, the government has issued Presidential Regulation Number 81 of 2010 concerning the Grand Design of Bureaucratic Reform which regulates the implementation of the bureaucratic reform program. For this reason, it is necessary to concretely implement a bureaucratic reform program in work units through efforts to build Integrity Zones. In developing reform efforts in the political, legal and economic fields, precede reform in the bureaucratic sector in implementing the initial wave of reform. For example, the central government reaffirmed the importance of implementing the concept of good governance in 2004. Local governments and all state departments and organizations were encouraged by the national government in 2011 to commit to the implementation of the bureaucratic reform agenda, which has the power to begin the process gradually in in 2014, and the creation of a professional and professional bureaucracy. In 2025, integrity will become a reality. Allegations of maladministration carried out by state and government officials are also increasingly rampant. The problem stems from the incomplete implementation of bureaucratic reform at the unit level. Even though the government has provided support for the integrity zone development program, the question is whether the steps taken by the Ponorogo Police Government can support the implementation of the integrity zone development properly.

Keywords: Integrity Zone, Development, Service.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang menciptakan bumi dan isinya, sehingga melalui pertanda-pertandanya, manusia diberikan pengetahuan dimana proses tersebut dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar, manusia kemudian diciptakan menjadi makhluk yang sempurna diantara ciptaan-Nya yang lain. Proses pembelajaran ini, kemudian menghasilkan salah satunya menghasilkan Tugas Akhir, berupa HaKI, dalam proses penyelesaian HaKI penulis merasa banyak terbantu oleh pihak-pihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara, maupun materil, sehingga ucapan terimakasih bisa kami sematkan dalam skripsi ini, ucapkan terimakasih ini kami sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ayub Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D.
2. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP, M.A.
3. Dosen Pembimbing, Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP, M.A.
4. Dosen dan Tenaga Pendidik yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Ponorogo

Demikianlah ucapan terimakasih ini kami sampaikan apabila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

ADITYA YOGA PRADANA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Aditya Yoga Pradana

NIM : 18221751

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM PELAYANAN SIM DI POLRES PONOROGO"** adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis/dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam skripsi ini terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini **DIGUGURKAN** dan gelar akademik saya yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 31 Juli 2024

Yang Menyatakan,



ADITYA YOGA PRADANA

NIM. 18221751

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar	30
Gambar 2.1 Gambar	43

